

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Pada 19 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2021

Nadia Febrianty¹, Gerry Hamdani Putra²

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi “KBP” PADANG

Jl. Khatib Sulaiman No.61 Lolong Belanti, Padang Utara, Sumatera Barat 25136

E-mail: febriantynadia00@gmail.com¹

Abstract. *To achieve regional independence, local governments must be able to manage their resources efficiently and effectively. This can be realized by government financial performance. This study aims to examine the effect of economic growth, local revenue, and capital expenditure on government financial performance. The samples of this study were 19 regencies / cities of West Sumatra Province in 2018-2021 using the total sampling technique. The analysis method used is the panel data regression method. Based on the results of this study, it shows that economic growth has no effect on government financial performance, local revenue has a positive and significant effect on government financial performance, and capital expenditure has a negative and significant effect on government financial performance.*

Keywords: *Economic Growth, Local Revenue, Capital Expenditure, and Government Financial Performance.*

Abstrak. Untuk mencapai kemandirian daerah, pemerintah daerah harus mampu mengelola sumber daya yang dimilikinya secara efisien dan efektif. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan kinerja keuangan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah. Sampel penelitian ini adalah 19 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2018-2021 dengan menggunakan teknik total sampling. Metode analisis yang digunakan adalah metode regresi data panel. Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah, pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah, dan belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah.

Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Dan Kinerja Keuangan Pemerintah

LATAR BELAKANG

Otonomi daerah menggambarkan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan pertimbangan wilayah bersangkutan dengan pengelolaan sumber dayanya sendiri sesuai dengan kebutuhan, pengutamaan, dan potensinya. Pemerintah memberikan kesempatan untuk menjalani kedaulatan daerah dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Pembagian keuangan dengan pemerintah pusat dan daerah, pelimpahan wewenang dan kewajiban kepada pemerintah daerah untuk mengatur sendiri penyelenggaraan pemerintahan dan kebutuhan rakyat sesuai dengan undang-undang (Sari & Mustanda, 2019).

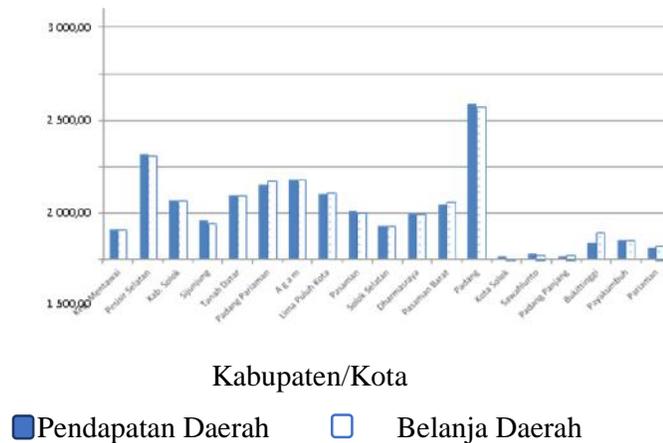
Pemerintah daerah sangat membutuhkan ahli pengendalian keuangan daerah. Pengelolaan keuangan atau sumber daya yang sudah ada di suatu daerah untuk tujuan mempertahankan pemerintahan daerah dikenal sebagai pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan yang efektif menjadi kunci untuk keberhasilan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah. Kemampuan daerah dalam merealisasikan roda pemerintahan mewujudkan gambaran dari kinerja pemerintah daerah. Bisa dikatakan bahwa bagian penting yang diperlukan pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan adalah kemampuan pemerintahan dalam menggali kekayaan asli daerah (Afia Maulina, Mustafa Alkamal, 2021).

Kinerja keuangan pemerintah adalah kesanggupan daerah untuk mencari dan mengelola sumber dana keuangan asli daerah untuk memenuhi kebutuhan dan mendukung berjalannya sistem pemerintahan (Jauhar, 2016). Kinerja keuangan merupakan daya upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah untuk mengevaluasi keefektifan dalam menghasilkan sumber pendapatan, untuk mencari peluang pertumbuhan, dan pembentukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Kondisi serta kinerja suatu instansi pemerintah bisa dilihat dari laporan keuangan yang telah disusun oleh pemerintah, laporan keuangan berkualitas harus memiliki pilihan untuk mencerminkan sejauh mana ringkasan laporan keuangan menghasilkan data yang asli dan masuk akal tentang penyajian keuangan yang menjadi dasar kinerja keuangan pemerintah (Indri & Putra, 2022). Pemerintah daerah dikatakan berhasil jika telah mencapai standar dan tujuan yang telah ditetapkan (Siregar, 2020)

Pemerintah pusat mengembangkan kebijakan otonomi daerah dengan tujuan agar pemerintah daerah lebih mandiri dalam mengelola keuangan daerahnya, oleh karena itu evaluasi kinerja keuangan pemerintah menjadi sangat penting. Dengan membandingkan rencana kerja dan pelaksanaannya, pengukuran kinerja keuangan untuk kepentingan publik dapat digunakan sebagai evaluasi dan pemulihan kinerja. Kemampuan pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi daerah menunjukkan bagaimana kinerja keuangan pemerintah dapat berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah setiap tahunnya (Antari & Sedana, 2018). Peningkatan kinerja keuangan pemerintah akan memberikan hasil baik pada kesejahteraan masyarakat, semakin banyak sumber daya yang akan digunakan untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat serta membiayai pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan, semakin mampu suatu daerah dalam mewujudkan potensi daerahnya (Putri & Darmayanti, 2019).

Gambar 1

**Realisasi Pendapatan dan Realisasi Belanja
Pemerintah Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, Tahun 2020 (Miliar
Rupiah)**



Berdasarkan data dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan paling rendah di antara kabupaten/kota lainnya pada tahun 2020 adalah Kota Solok yakni sebesar 545,56 miliar rupiah. Realisasi pendapatan terendah kedua adalah Kota Padang Panjang yang diikuti oleh Kota Sawahlunto, yaitu masing-masing sebesar 547,77 miliar rupiah dan 576,86 miliar rupiah. Pada umumnya penerimaan

kabupaten/kota sebagian besar berasal dari dana perimbangan, terutama diperoleh dari Dana Alokasi Umum. Sementara pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah masing-masing kabupaten/kota masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan karena masing-masing kabupaten/kota belum bisa mengelola kemampuan daerah lebih maksimal. Seiring dengan pendapatannya, belanja Kota Padang juga melahirkan pengeluaran terbesar dibanding kabupaten/kota lain. Belanja terbesar kedua juga berada pada Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Agam. Total belanja Pemerintah Kota Padang tahun 2020 adalah senilai 2.139,91 miliar rupiah. Sementara belanja Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Agam adalah masing-masing sebesar 1.614,56 miliar rupiah dan 1.354,15 miliar rupiah. Semakin tinggi pengeluaran investasi pemerintah, semakin rendah kinerja keuangan pemerintah. Belanja modal belum mampu memberikan kontribusi penuh terhadap kemajuan pendapatan daerah sehingga kinerja keuangan pemerintah kurang baik (BPS, 2020).

Salah satu karakteristik yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah yaitu pertumbuhan ekonomi. Menurut Nasution & Panggabean, (2017) Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat diketahui dari kajian produk domestik regional bruto (PDRB) yang merupakan jumlah nilai tambah dari seluruh unit usaha pada suatu waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan kegiatan ekonomi yang dapat bernilai positif dan bernilai negatif. Dapat dikatakan bahwa ketika suatu periode ekonomi menunjukkan pertumbuhan positif maka aktivitas ekonomi meningkat, tetapi ketika ekonomi mengalami pertumbuhan negatif selama suatu periode, aktivitas ekonomi menurun. Pertumbuhan ekonomi nasional yang dihitung melalui GDP (Gross Domestic Product) juga dapat menjadi indikator atas laju perekonomian nasional yang dalam hal ini berkaitan dengan efektivitas dari tingkat investasi dalam maupun luar negeri. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat tentu menjadi hasil tersendiri bagi pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya, dan seharusnya pemerintah daerah dapat membuktikan dengan kinerja yang baik termasuk dalam hal keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati & Hamzah, (2020), dan Nasution & Panggabean, (2017) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh suatu daerah melalui pemungutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan peraturan daerah. Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan sumber pendapatan asli daerah. Menurut penelitian (Antari & Sedana, 2018), (Sari & Mustanda, 2019), (Afia Maulina, Mustafa Alkamal, 2021), menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah.

(Sari & Mustanda, 2019) mendefinisikan belanja modal sebagai pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan, dan pengembangan aset tetap berwujud yang digunakan pada kegiatan pemerintah, sehingga dapat menghasilkan kontribusi terhadap perkembangan pendapatan daerah. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah daerah berupa fasilitas umum seperti, pembangunan jalan, gedung dan bangunan, penyediaan transportasi umum dan sebagainya. Hal ini tentu dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, belanja modal dapat mendorong investasi yang berdampak pada pertumbuhan pendapatan daerah dimasa yang akan datang. Pertumbuhan pendapatan daerah yang terus bertambah mengindikasikan kinerja keuangan pemerintah baik (Antari & Sedana, 2018). Menurut (Sari & Mustanda, 2019), mengatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah. Belanja modal yang tinggi yang dimiliki memberikan dampak terhadap peningkatan kinerja keuangan pemerintah. Sedangkan menurut (Anggreni & Sri Artini, 2018), dan (Nauw & Riharjo, 2021), mengatakan bahwa belanja modal berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah, Pemerintah pusat belum pemeratakan pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana yang dikeluarkan oleh negara yang tercermin dari dalam Belanja Modal yang dilakukan oleh pemerintah.

TINJAUAN LITERATUR

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah

Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian dan menunjukkan sejauh mana kegiatan ekonomi menghasilkan pendapatan tambahan bagi masyarakat selama periode waktu tertentu (Heryanti et al., 2019). Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah dapat digunakan untuk memperkirakan pertumbuhan ekonomi, yang merupakan upaya peningkatan kapasitas produksi untuk memperoleh output yang lebih besar (Nasution & Panggabean, 2017).

Penelitian yang dilakukan (Nurhayati & Hamzah, 2020) dan (Nasution & Panggabean, 2017) mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan. Kapasitas keuangan antar daerah dengan memperhitungkan potensi daerah, wilayah, kondisi geografis, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah untuk membiayai kebutuhan belanja daerah, sehingga dana alokasi umum digunakan untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah maka akan semakin baik pula kinerja keuangan pemerintah.

H₁ : Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh suatu daerah melalui pemungutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan peraturan daerah (Antari & Sedana, 2018). Pendapatan asli daerah dipertimbangkan sebagai pendanaan untuk berbagai pengeluaran yang diputuskan oleh daerah itu sendiri, terutama untuk kebutuhan rutin (Afiah, 2009). Pemungutan pendapatan asli daerah didasari oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah (Nauw & Riharjo, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh (Antari & Sedana, 2018), (Sari & Mustanda, 2019), (Afia Maulina, Mustafa Alkamal, 2021), dan (Anggreni & Sri Artini, 2018) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif. Tingginya pencapaian pendapatan asli daerah dapat memajukan kemandirian pemerintah

daerah sehingga hal tersebut berimplikasi pada kinerja keuangan pemerintah, makin tinggi pendapatan asli daerah jadi tingkat ketergantungan fiskal pada pemerintah pusat dapat makin berkurang. Jika sumber keuangan dapat dimanfaatkan dengan optimal maka dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah

H₂ : Pendapatan Asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah.

Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah

Belanja modal adalah pengeluaran yang akan menumbuhkan asset atau kekayaan pemerintah dan juga akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasi dan pemeliharaan (Ningrat & Supadmi, 2019). Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang meningkatkan kesejahteraan daerah dan berlangsung lebih dari satu tahun anggaran. biaya rutin seperti pemeliharaan akan naik di bawah kategori pengeluaran administrasi umum (Halim, 2004). Belanja modal digunakan untuk pembiayaan yang terjadi sehubungan dengan pembelian, pengadaan atau pembangunan asset tetap yang mempunyai masa guna lebih dari 12 bulan yang akan digunakan kepada kegiatan pemerintah seperti: tanah, peralatan, mesin, bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan serta kekayaan berwujud lainnya (Darise, 2008).

Penelitian yang dilakukan (Nauw & Riharjo, 2021), Anggreni & Sri Artini, (2018), dan (Ningrat & Supadmi, 2019) memaparkan bahwa belanja modal berpengaruh negatif. Karena tidak semua kegiatan belanja modal mampu menghasilkan sumber-sumber keuangan secara langsung bagi daerahnya. Keberhasilan dari setiap kegiatan belanja modal tidak hanya diukur dari segi pertumbuhan pendapatan daerah tetapi juga dari segi mutu yang diberikan sesuai dengan yang diharapkan, sesuatu yang dihasilkan sesuai dengan jumlah yang ditentukan, kegiatan belanja modal mengarah kepada kepentingan publik dan biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan belanja modal semestinya tidak melebihi anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya

H₃ : Belanja Modal berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Sumber data yang peneliti gunakan adalah data sekunder. Data sekunder yang peneliti gunakan berupa data realisasi laporan anggaran keuangan pada 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat yang diperoleh melalui situs online, dimana data pendapatan asli daerah, belanja modal, dan kinerja keuangan pemerintah di peroleh dari <https://sumbar.bpk.go.id/> dan sedangkan data pertumbuhan ekonomi di peroleh dari situs <https://sumbar.bps.go.id/>. Penelitian ini memiliki tujuan populasi utama yaitu 19 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2018-2021 dimana terdapat 12 Kabupaten dan 7 Kota. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah total sampling.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi data panel dengan rumus persamaan sebagai berikut :

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + e_{it}$$

Keterangan:

Y = Kinerja Keuangan Pemerintah (variabel dependen)

α = Konstanta

$\beta_1 \beta_2 \beta_3$ = Koefisien regresi variabel independen

X_{1it} = Pertumbuhan Ekonomi

X_{2it} = Pendapatan Asli Daerah

X_{3it} = Belanja Modal

e_{it} = Variabel Pengganggu (Residual Error)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian Kelayakan Model Regresi Panel

Pengujian Chow Test

Tabel 1 Hasil Uji Chow

<i>Effects Test</i>	<i>Statistic</i>	<i>d.f.</i>	<i>Prob.</i>
<i>Cross-section F</i>	54,49253 7	(18,54)	0,0000
<i>Cross-section Chi-square</i>	224,4312 58	18	0,0000

Sumber: Pengolahan Data E-Views 9

Berdasarkan uji chow yang ditunjukkan pada tabel 2 tersebut memperoleh nilai signifikan dari *cross-section chi-square* dan *cross-section F* sebesar 0.0000 kurang dari 5% ($0.0000 < 0,05$), sehingga secara sistematis H_0 ditolak dan H_1 diterima, maka model estimasi yang tepat digunakan adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Proses selanjutnya harus melalui Uji *Hausman*.

Uji Hausman

Tabel 2 Hasil Uji Hausman

<i>Test Summary</i>	<i>Chi-Sq. Statistic</i>	<i>Chi-Sq. d.f.</i>	<i>Prob.</i>
<i>Cross-section random</i>	9,598928	3	0,0223

Sumber: Olah Data E-views 9

Berdasarkan tabel 3 diperoleh nilai probability untuk *cross-section random* sebesar $0.0223 < 0,005$ sehingga hasil uji menunjukkan H_0 diterima dan H_1 ditolak, maka dapat disimpulkan *Fixed Effect Model* layak untuk digunakan dibanding dengan *Random Effect Model*.

Regresi Data Panel (*Fixed Effect Model*)

Tabel 3 Hasil pengujian *Fixed Effect Model* (FEM)

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std.Error</i>	<i>t-statistic</i>	<i>Prob.</i>
C	-14,66796	2,206886	-6,646452	0,0000
LOGX ₁	-0,012958	0,040984	-0,316165	0,7538
LOGX ₂	0,809816	0,076351	10,60649	0,0000
LOGX ₃	-0,130450	0,039346	-3,315489	0,0021

Sumber: Olah Data E-views 9

Berdasarkan hasil menggunakan *Fixed effect model* (FEM), didapat persamaan sebagai berikut:

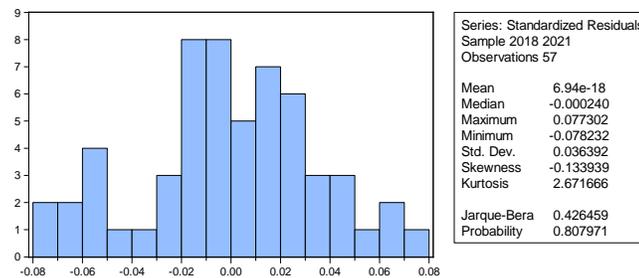
$$\text{LogY} = -14.66796 - 0.0012958 \text{LogX}_{1it} + 0.809816 \text{LogX}_{2it} - 0.130450 \text{LogX}_{3it}$$

Hasil persamaan di atas diperoleh konstanta bernilai negatif sebesar 14,6679 yang artinya jika pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan belanja modal mengalami kenaikan sebesar 1 satuan rupiah maka kinerja keuangan pemerintah mengalami penurunan sebesar 14,6679 jika pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan belanja dianggap tetap atau sama dengan 0.

Koefisien pertumbuhan ekonomi bernilai negatif sebesar 0,0129 artinya apabila pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan 1 satuan rupiah maka pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan sebesar 0,0129 jika variabel independent lain nilainya tetap atau konstan. Koefisien Pendapatan Asli Daerah bernilai positif sebesar 0,8098 yang artinya apabila pendapatan asli daerah mengalami kenaikan sebesar 1 satuan rupiah maka pendapatan asli daerah mengalami peningkatan sebesar 0,8098 jika variabel independent lain nilainya tetap atau konstan. Koefisien variabel belanja modal bernilai negatif sebesar 0,1304 artinya apabila belanja modal mengalami kenaikan sebesar 1 satuan rupiah maka belanja modal mengalami penurunan sebesar 0,1304 jika variabel independent lain nilainya tetap atau konstan.

Uji Normalitas

Gambar 2 Uji Normalitas



Berdasarkan hasil uji normalitas pada gambar 1 dapat diketahui bahwa nilai *probability JB* sebesar 0,8079. Nilai $0,8079 > 0,05$ maka data residual berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4 Hasil Uji Multikolinearitas

<i>Variable</i>	<i>Alpha ()</i>	<i>Prob.</i>	Kesimpulan
Pertumbuhan ekonomi Pendapatan Asli Daerah	0,8	0,000451	Terbebas dari multikolinearitas
Pertumbuhan ekonomi belanja modal	0,8	-0,001195	Terbebas dari multikolinearitas
Pendapatan asli daerah belanja modal	0,8	0,000146	Terbebas dari multikolinearitas

Sumber: Olah Data E-Views 9

Hasil uji multikolinearitas terlihat bahwa nilai koefisien korelasi dari semua variabel bebas $< 0,80$ maka dapat disimpulkan bahwa hubungan variabel pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan belanja modal terbebas dari gejala multikolinearitas dan dapat diartikan bahwa variabel-variabel tersebut layak untuk dipakai dalam penelitian ini.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5 Hasil uji Heteroskedastisitas

<i>Variable</i>	<i>Alpha ()</i>	<i>Prob.</i>	Kesimpulan
Pertumbuhan Ekonomi	0,05	0,3129	Terbebas dari gejala heterokedastisitas
Pendapatan Asli Daerah	0,05	0,1179	Terbebas dari gejala heterokedastisitas
Belanja Modal	0,05	0,2755	Terbebas dari gejala heterokedastisitas

Sumber: Olah Data E-views 9

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa variabel indenpenden tidak terjadi heterokedastisitas , karena mempunyai nilai *prob* lebih besar dari 0,05.

Pengujian Hipotesis

Tabel 6 Hasil Uji Koefisien Regresi secara Parsial (Uji T)

Variabel	Koefisien	t-Statistic	t-Table	Prob.	Alpha	Kesimpulan
Pertumbuhan Ekonomi	-0,012958	-0,316165	1,6660	0,7538	0,05	H ₁ Ditolak
Pendapatan Asli Daerah	0,809816	10,60649	1,6660	0,0000	0,05	H ₂ Diterima
Baelanja Modal	-0,130450	-3,315489	1,6660	0,0021	0,05	H ₃ Diterima
C	-14,66796	-6,646452	1,6660	0,0000		

Sumber: Olah Data E-View 9

Dilihat dari tabel uji parsial diatas dapat dilihat pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen secara parsial sebagai berikut:

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. Uji t terhadap variabel pertumbuhan ekonomi diperoleh nilai tstatistic sebesar $-0,316165 < t_{tabel} 1,6660$ dan nilai probabilitas dengan tingkat kesalahan $0,05$ sebesar $0,7538 > 0,05$ maka Hipotesis ditolak. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah pada kabupaten/kota di sumatera barat pada tahun 2018-2021.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. Uji t terhadap variabel pendapatan asli daerah diperoleh nilai tstatistic sebesar $10,60649 > t_{tabel} 1,6660$ dan nilai probabilitas dengan tingkat kesalahan $0,05$ sebesar $0,0000 < 0,05$ maka hipotesis diterima. Hasil tersebut dapat disimpulkan secara parsial variabel pendapatan asli daerah terdapat pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah pada Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat tahun 2018-2021.

Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. Uji t terhadap variabel belanja modal diperoleh nilai tstatistic sebesar $-3,315489 < t_{tabel} 1,6660$ dan nilai probabilitas dengan tingkat kesalahan $0,05$ sebesar $0,0021 < 0,05$ maka hipotesis diterima. Hasil tersebut dapat dinyatakan secara parsial variabel belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat pada tahun 2018-2021.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 7 Uji Koefisien Determinasi (R²)

Keterangan	Koefisien
R-squared	0,993070
Adjusted R-squared	0,988912

Sumber: Olah Data E-views 9

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai Adjusted R-squared sebesar 0.993070, hal ini berarti variabel pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan belanja modal memiliki kontribusi sebesar 98,89% sedangkan sisanya yaitu

1,11% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukan atau dijelaskan oleh indikator lain diluar penelitian ini.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah

Berdasarkan hasil uji regresi secara parsial menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah pada 19 kabupaten/kota provinsi Sumatera Barat tahun 2018-2021. Peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak dapat dijadikan tolak ukur peningkatan kinerja keuangan pemerintah. Demikian pula sebaliknya penurunan pertumbuhan ekonomi tidak dapat dijadikan tolak ukur penurunan kinerja keuangan pemerintah. Hal ini terjadi karena pertumbuhan ekonomi disuatu daerah dalam menarik investor untuk membuka usaha belum terealisasikan secara maksimal. Selain itu, infrastruktur dan sarana prasarana daerah juga belum mendukung peningkatan investasi dan produktivitas masyarakat, sehingga belum mampu meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor tersebut, padahal pendapatan asli daerah yang tinggi mencerminkan keuangan daerah yang maju.

Hal ini juga diperkuat dengan penelitian terdahulu yang diteliti oleh (Heryanti et al., 2019) yang menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah. Hal ini diartikan bahwa setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi suatu daerah, tidak diikuti oleh kenaikan kinerja keuangan dari pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Meskipun pertumbuhan ekonomi disuatu daerah mengalami perubahan yang fluktuatif (naik turun) yang disebabkan oleh beberapa faktor produksi disuatu daerah tidak serta merta dapat meningkatkan kinerja keuangan dalam jangka waktu singkat, akan tetapi memerlukan jangka waktu yang panjang dan berkesinambungan.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh setelah dilaksanakan pengujian terhadap 76 data observasi yang dimana data Pendapatan asli daerah diambil dari badan pemeriksaan keuangan Sumatera Barat periode 2018-2021 yang telah diseleksi berdasarkan eviews 9, hipotesis kedua yang dikemukakan dalam penelitian ini yaitu pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah. Berdasarkan hasil uji nilai t hitung untuk variabel pendapatan asli daerah membuktikan bahwa H_2 diterima artinya ada pengaruh positif antara

variabel pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah. Hal ini dapat menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah dimana jika pendapatan asli daerah meningkat berarti juga akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah. Hal ini terjadi karena pemerintah Kabupaten/Kota menekankan atas hasil pendapatan asli daerah mereka yang berasal dari berbagai sumber yang dikelola oleh daerah dalam bentuk penerimaan pajak, retribusi dan penerimaan lainnya yang sah yang diatur dalam undang-undang.

Hasil penelitian ini juga diperkuat dengan penelitian terdahulu yang diteliti oleh Afia Maulina, Mustafa Alkamal, (2021), Sari & Mustanda, (2019) dan Antari & Sedana, (2018) yang menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah. Pendapatan asli daerah memberikan arti penting bagi daerah karena nantinya akan dapat dipergunakan untuk menjalankan roda pemerintahan guna menunjang kesejahteraan masyarakatnya. Peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah yang tinggi setiap tahunnya menunjukkan tingginya sumber keuangan daerah. Jika sumber keuangan dapat dimanfaatkan dengan optimal maka dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah. Dimana tingginya penerimaan pendapatan asli daerah dapat meningkatkan kemandirian pemerintah daerah sehingga hal tersebut berimplikasi pada kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh setelah dilaksanakan pengujian dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal berpengaruh negative signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah pada 19 kabupaten/kota provinsi Sumatera Barat tahun 2018-2021. Berdasarkan hasil uji nilai statistic dengan analisis regresi data panel dalam penelitian ini untuk variabel belanja modal membuktikan bahwa H_3 diterima dengan koefisien bernilai negatif yang artinya terdapat ada pengaruh negatif signifikan antara variabel belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah. Hal ini menjelaskan bahwa pemerintah pusat belum pemeratakan pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana yang di keluarkan oleh negara yang tercermin dari belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah. Belanja modal yang besar belum mencerminkan banyaknya infrastruktur dan sarana yang

dibangun. Semakin banyak pembangunan yang dilakukan belum bisa menentukan tingkat kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan Nauw & Riharjo, (2021), Ningrat & Supadmi, (2019) dan Anggreni & Sri Artini, (2018) yang menunjukkan hasil bahwa belanja modal berpengaruh negative dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah. Karena tidak semua kegiatan belanja modal mampu menghasilkan sumber-sumber keuangan secara langsung bagi daerahnya. Keberhasilan dari setiap kegiatan belanja modal tidak hanya diukur dari segi mutu yang diberikan sesuai dengan yang diharapkan, sesuatu yang dihasilkan sesuai dengan jumlah yang ditentukan, kegiatan belanja modal mengarah kepada kepentingan public dan biaya yang dikeluarkan untuk belanja modal semestinya tidak melebihi anggaran yang sudah ditetapkan. Hal ini berarti semakin tinggi belanja modal, maka semakin rendah tingkat kinerja keuangan pemerintah.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan hasil pengujian hipotesis dapat diajukan beberapa kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu: 1) Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2018-2021. Hal ini menjelaskan bahwa tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi tidak mempengaruhi besar kecilnya kinerja keuangan pemerintah, 2) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah 19 Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat tahun 2018-2021. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan asli daerah maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah. 3) Belanja Modal berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2018-2021. Jika semakin tinggi belanja modal maka semakin rendah tingkat kinerja keuangan pemerintah.

DAFTAR REFERENSI

- Afia Maulina, Mustafa Alkamal, N. S. F. (2021). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. 5(2), 135. <https://doi.org/10.52362/jisamar.v5i2>
- Afiyah, N. N. (2009). *Akuntansi Pemerintahan: Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah* (Ed. 1. Cet). Prenada Media Group.
- Anggreni, N. K. A., & Sri Artini, L. G. (2018). Pengaruh Pad, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Badung Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 8(3), 1315. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2019.v08.i03.p06>
- Antari, N. P. G. S., & Sedana, I. B. P. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 7(2), 1080–1110. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/EJMUNUD.2018.v7.i02.p19>
- BPS. (2020). *Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Sumatera Barat 2020-2021*. BPS SUMBAR. <https://sumbar.bps.go.id/>
- Darise, N. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)* (cetakan I.). PT INDEKS, Jakarta.
- Halim, A. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah* (Edisi Revi). Salemba Empat.
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah* (Edisi 4). Salemba Empat.
- Heryanti, C. D., Wahidahwati, W., & Suryono, B. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 3(1). <https://doi.org/10.25139/jaap.v3i1.1721>
- Indri, F. Z., & Putra, G. H. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Konsentrasi Pasar Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2016-2020. *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 2(2), 01–17.
- Jauhar, F. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kab/Kota Sumatera Barat. *Jurnal Akuntansi*, 1(2), 61–70.
- Mansuri. (2016). *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews*.
- Nasution, N. A., & Panggabean, F. Y. (2017). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 8(1), 1–19. <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/akuntansibisnisdanpublik/article/view/122>

- Nauw, E. T., & Riharjo, I. B. (2021). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*.
- Ningrat, C. I. N. K., & Supadmi, N. L. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(3), 1819–1837. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index>
- Nurhayati, N., & Hamzah, A. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen*, 1(2), 22–34. <https://journal.uniku.ac.id/index.php/jeam>
- Putri, N. K. N. I., & Darmayanti, N. P. A. (2019). Pengaruh Pad Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 8(5), 2834. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2019.v08.i05.p09>
- Putri, R. S., & Rahayu, S. (2019). *Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Jawa Barat*. 3(2).
- Sari, N. M. D. P., & Mustanda, I. K. (2019). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 8(8), 4759. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2019.v08.i08.p02>
- Siregar, M. I. C. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Propinsi Papua. *Jurnal Aplikasi Manajemen, Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 26–42. <https://doi.org/10.51263/jameb.v5i1.111>
- Winarno, W. W. (2017). *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews* (keempat). UPP STIM YKPN.